

# DRAMATURGIS KOMUNIKASI POLITIK PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

IWAN KOSWARA<sup>1</sup>, ILHAM GEMIHARTO<sup>2</sup>

FIKOM UNPAD

(alamat)

<sup>1</sup>iwankoswara17@gmail.com

## ABSTRAK

Fenomena menarik tentang situasi perpolitikan di Indonesia, berimbas terhadap lahirnya partai-partai politik. tidak terkecuali Partai-Partai Politik yang berlatar belakang keagamaan khususnya Partai Politik Islam, seperti PKB dan PKS. Salah satu organisasi keagamaan yaitu Persatuan Islam (PERSIS), yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tentunya Sebagai ormas keagamaan, yang berdiri dalam dua sisi Agama dan Politik, kehadirannya dalam kancah politik tentu telah memunculkan bagaimana Persis memainkan kinerja komunikasi politiknya. Berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui; 1). Bagaimana komunikasi politik yang dijalankan anggota jamaah persatuan islam dalam memainkan peran politiknya. 2) Bagaimana strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh anggota (jamaah) persatuan islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, analisis kajian didasarkan pada reduksi data, menyajikan data serta menyimpulkan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa melalui manuper komunikasi politik yang dilakukannya jamaah persatuan islam telah menunjukkan eksistensinya sebagai politisi yang handal dalam kancah politik.

**Kata Kunci :** *Dramaturgis, Komunikasi Politik, Persatuan Islam*

---

## PENDAHULUAN

Persatuan Islam (Persis) adalah sebuah organisasi keagamaan, secara resmi Persis didirikan pada hari rabu tanggal 12 september 1923 di Bandung. Dengan demikian sebagai organisasi formal yang berdiri secara resmi, maka persis telah merupakan wadah organisasi dari umat Islam. Persis berusaha sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi yaitu : Persatuan Pemikiran Islam, Persatuan rasa Islam, Persatuan usaha Islam, dan Persatuan suara Islam. Bertitik tolak dari hal itulah maka organisasi (*jam'iyah*) itu dinamakan "Persatuan Islam". (Kamiludin, 2006 : 66).

Seiring perjalanan waktu, Persatuan Islam mengikrarkan diri sebagai sebuah organisasi independen, dan berfokus pada aspek keagamaan, dan tidak ikut campur dalam kancah politik. Di zaman orde lama maupun orde baru, konsistensi keagamaan adalah fokusnya. Persis tidak berpihak kepada organisasi atau partai-partai politik bentukan pemerintah pada waktu itu baik secara individu maupun secara legal formal organisasi Badri, (2002 : 67) dalam Turmudi (2014 : 2).

Setelah lama mengasingkan diri dari percaturan politik praktis, Persatuan Islam mulai memberikan respon ketika rezim orde baru runtuh digantikan dengan orde reformasi. Sejak lahirnya reformasi tahun 1998, kepekaan politik Persatuan Islam mulai terbangun. Hal ini sejalan dengan era demokratisasi dan keterbukaan (Mufti, 2000 : 9). Terbukanya peluang ini Persatuan Islam mendapatkan angin segar untuk mengekspresikan aspirasi politiknya yang selama masa orde baru, terpasung dan tersumbat oleh budaya politik tertutup dan otoriter.

Seiring perjalanan waktu, ada kecenderungan bahwa jamaah persatuan islam merasa kecewa atas perilaku para elit partai politik, khususnya para wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fenomena pemilihan umum presiden, serta berbagai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) mengisyaratkan bagaimana ekspresi dan aspirasi politik yang bergeliat dari organisasi keagamaan ini (Persis), dimana aspirasi politik persatuan islam ini disalurkan ke dalam partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), namun demikian perjalanan politik persatuan islam, berubah haluan, sejalan dengan runtuhnya Partai Bulan Bintang, dan aspirasi persatuan islam sekarang tersalurkan lewat partai lain yang dikenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Turmudi (2014 : 3)

Keberadaan partai politik dalam negara dianggap sebagai salah satu institusi demokrasi, karena fungsi parpol adalah (1). Menyerap dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, (2) sarana sosialisasi dan komunikasi politik, (3). Media penyaluran perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat, maka partai politik yang kuat menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa. Sutrisno (2011: 18). Terkait dengan pernyataan tersebut PKS sebagai salah satu parpol besar, dimana diantara anggotanya merupakan jamaah persatuan islam. Tentunya keberadaan jamaah persatuan islam dalam partai politik tersebut, akan memainkan dua peran penting yaitu sebagai seorang pendakwah (da'i), juga sebagai politikus. Oleh karenanya penulis ingin mengkaji sejauhmana dinamika komunikasi politik jamaah Persatuan Islam, dalam memainkan perannya sebagai Da'i namun juga sekaligus berperan sebagai Politikus. Oleh karena itu, ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni : 1). Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan anggota (jamaah) Persatuan Islam dalam memainkan peran politiknya. 2) Bagaimana strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh anggota (jamaah) persatuan islam.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam pembahasan tentang Dramaturgis Komunikasi Politik Persatuan Islam, ada beberapa konsep penting sebagai landasan konseptual/teori yang dipakai. Yang pertama berkaitan dengan Teori Dramaturgis, dan kedua adalah mengenai konsep Komunikasi Politik.

Dramaturgis merupakan teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman, Dia melihat banyak kesamaan antara pementasan teater dengan berbagai jenis peran yang kita mainkan dalam interaksi dan tindakan sehari-hari. Ada empat hal yang dibahas tentang aspek dramaturgis ini yaitu : presentasi diri, panggung depan, panggung belakang, dan penggunaan tim dan interaksi sebagai ritual. Dijelaskan bahwa setiap orang selalu berusaha menampilkan diri. Orang menampilkan diri berdasarkan prinsip-prinsip pertunjukkan teater yang bersifat dramaturgis. Ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain, yang disebut pengelolaan kesan. Mengelola kesan dilakukan

melalui teknik-teknik tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. (Turmudi, 2014 : 43)

Dalam perspektif dramaturgis seseorang yang sedang berinteraksi layaknya seseorang yang sedang bermain peran, permainan peran itu disebut presentasi diri. Presentasi diri, seperti yang ditunjukkan Goffman, bertujuan memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada. Para aktor memanipulasi pesan dan perilaku secara dramatis agar orang percaya, salut dan terkesima terhadapnya. Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Ia menyebut upaya itu sebagai pengelolaan kesan (*impression management*), yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Memang segala sesuatu yang terbuka mengenai diri kita sendiri dapat digunakan untuk memberi tahu orang lain siapa kita. Kita mengelola informasi, dan informasi yang diberikan kepada orang lain. Kita mengendalikan pengaruh yang akan ditimbulkan, supaya orang lain memandang kita sebagai orang yang ingin kita tunjukkan. Dalam pandangan dramaturgis, interaksi dan kehidupan manusia ibarat teater. Suatu pertunjukan di atas panggung yang menampilkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor. Kehidupan sosial menurut Goffman terbagi atas wilayah depan (*front region*) dan wilayah belakang (*back region*). Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka seperti sedang memainkan suatu peran di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaliknya, wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkannya mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah depan ibarat panggung sandiwara yang ditonton khalayak penonton, sedangkan wilayah belakang (*back stage*) kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan (Mulyana, 2003 : 114).

Di semua interaksi sosial terdapat semacam bagian depan (*front region*) yang ada persamaannya dengan pertunjukan teater. Di bagian belakang (*back region*), yakni tempat yang memungkinkan aktor mundur guna menyiapkan diri untuk pertunjukan berikutnya. Goffman menemukan kiasan cemerlang di dalam pertunjukan teater ini yang dapat digunakan untuk memahami proses sosial. (Ritzer dan Goodman, 2010 : 94). Karena itulah, panggung depan adalah bagian penampilan individu secara teratur berfungsi sebagai metode umum untuk tampil di depan publik sebagai sosok yang ideal. Sedangkan panggung belakang, merupakan rahasia yang tidak dapat dilihat di atas permukaan. Dalam hal ini tidak mustahil bahwa tradisi dan karakter pelaku sangat berbeda dengan apa yang dipentaskan di depan umum. Dengan demikian, ada kesenjangan peranan maupun keterikatan peranan Supardan, (2009 : 158) dalam Turmudi (2014 : 48).

Komunikasi Politik. Merupakan suatu sistem yang mendasar dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola komunikasi, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Almond dan Powell dalam Nasution (1990 : 24).

Menurut Kantaprawira (2004 : 61). Bahwa komunikasi politik gunanya untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran antar golongan, institusi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Melalui komunikasilah pikiran politik dapat dipertemukan, karena pada hakekatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikannya, melalui pesan, dan akhirnya ada yang menerima atau menanggapinya. Komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. (Mulyana, 2013 : 4). Pendapat lain mengenai komunikasi politik dikemukakan oleh Soemarno (2002 : 15). Bahwa komunikasi politik sebagai suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti. Pengertian tersebut menunjukkan kepada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai, baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat, agar terwujud jalinan komunikasi antar penguasa dengan masyarakat yang mengarah kepada kesamaan makna. Dalam Turmudi (2014 : 54-55).

## **METODE PENELITIAN**

Mulyana (2003 : 145) menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji sebuah topik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2002 : 1), Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan penggambaran holistik atas masalah tersebut yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan dengan terperinci sesuai sudut pandang informan, dan disusun dalam latar ilmiah. Istilah deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Paramita (2015), Penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan-bahan mentah yang digunakan untuk analisis kualitatif. Penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif memiliki relasi dengan analisis data visual dan data verbal yang merefleksikan pengalaman sehari-hari. Ciri lain penelitian ini adalah titik beratnya pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistik setting*). Penelitian ini juga bukan menjabarkan (*analitis*), tetapi juga memadukan (*sintetis*). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Salah satu kegunaan penelitian ini adalah sangat berguna dalam melahirkan atau menciptakan teori-teori tentatif. Barangkali disinilah letak perbedaan mendasar metode deskriptif kualitatif dibandingkan metode lainnya. Metode deskriptif tidak menguji teori, melainkan mencari teori. Seringkali penelitian deskriptif timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoritis yang dapat menjelaskannya. Penelitian deskriptif kualitatif memerlukan kualifikasi-kualifikasi yang memadai. Pertama, peneliti harus memiliki sifat *reseptif*. Ia harus selalu mencari, bukan menguji, Kedua, ia harus

memiliki kekuatan *integratif*, kekuatan untuk memadukan berbagai macam informasi yang diterimanya menjadi satu kesatuan penafsiran yang tepat. Jadi penelitian deskriptif kualitatif ini bukan saja menjabarkan, tetapi juga memadukan. Bukan saja klasifikasi, tetapi juga organisasi, maksudnya data tersebut tidak hanya dipaparkan secara gamblang namun dipadukan disangkutpautkan dengan data lain yang berhubungan sehingga menjadi suatu temuan lapangan yang dapat menggambarkan secara jelas fenomena yang diteliti. (Nugraha dan Romli, 2012 : 12). Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber , juga melalui pendekatan studi literatur, menelusuri berbagai sumber bacaan seperti dari media massa, buku ,serta jurnal. Analisis kajian didasarkan pada reduksi data, menyajikan data serta menyimpulkan data penelitian. Berdasarkan data yang didapatkan inilah yang akan menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji mengenai Dramaturgis Komunikasi Politik Persatuan Islam (Persis).

## PEMBAHASAN

Dinamika politik dari waktu ke waktu terus berkembang. Perkembangan dan perubahan politik yang terjadi telah mendorong hadirnya partai-partai politik yang bermain dalam tataran politik Indonesia ini, diantaranya ormas-ormas keagamaan, dan salah satunya adalah ormas keagamaan Persatuan Islam (PERSIS), yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai ormas keagamaan, yang berdiri dalam dua sisi Agama dan Politik, kehadirannya dalam kancah politik tentu telah memunculkan bagaimana Persis memainkan kinerja komunikasi politiknya. Menjadi politikus akan memberikan implikasi dalam kehidupan jamaah persatuan islam. Setelah jamaah persatuan islam menjadi politikus tentu akan terjadi pandangan atau penilaian yang berubah dari masyarakat terhadap dirinya dan ini akan memberikan penilaian pada pribadi jamaah persatuan islam itu sendiri ; dimana di satu sisi sebagai jamaah (pendakwah) di sisi lain sebagai politikus, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi pencitraan dirinya.

Sebagai aktor sosial, jamaah persatuan islam tentu selalu berkomunikasi dengan khlayaknya, dan bersikap berdasarkan pemaknaannya terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya. Status politikus yang disandang jamaah persatuan islam, tentu akan menimbulkan pandangan dan penilaian terhadap dirinya. Jamaah persatuan islam bertindak sebagai aktor pertunjukkan. Penampilan pertunjukkan mereka ditunjang oleh kehadiran team yang mendukung penampilannya. Ketika jamaah persatuan islam yang berkiprah di politik diamati, dan bagaimana mereka melakukan manufer politik, maka manufer politik merupakan salah satu bentuk pertunjukkan bagi orang lain. Meskipun kesan pelaku terhadap pertunjukkan bisa berbeda-beda, mereka berusaha melakukannya sebaik mungkin, yang dapat mereka lakukan demi menimbulkan kesan yang diharapkan. Goffman, membagi dua wilayah pertunjukkan yaitu; panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan merupakan penampilan individu yang secara teratur (*routine*) berfungsi di dalam model yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi penampilan mereka. Sedangkan panggung belakang merupakan wilayah yang sangat pribadi. Sedapat mungkin ditutupi dan tidak boleh diketahui orang lain. Karena itu, penampilan diri lebih merupakan manajemen kesan (*impression management*). Ia merupakan dramatisasi (sandiwara).

Pengelolaan kesan (*impression management*) jamaah persatuan islam merupakan realitas komunikasi yang dimainkan oleh jamaah persatuan islam sebagai bentuk pencitraan diri yang positif. Pengelolaan kesan yang dilakukan oleh jamaah persatuan islam tidak terlepas dari pemaknaan status diri yang dilakukan oleh mereka.

Pengelolaan kesan (*impression management*), Goffman dalam Mulyana (2003:112) mengatakan bahwa pengelolaan kesan merupakan teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang menjadi kajian dramaturgis, adalah penggunaan panggung oleh sang aktor dalam kehidupan sosialnya. Sebagai aktor sosial, senantiasa berkomunikasi dengan menggunakan dua wilayah yakni panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Pengelolaan kesan dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai salah satu fenomena komunikasi yang dikonstruksi jamaah persatuan islam sebagai politikus, dalam upaya mereka memberikan kesan-kesan tertentu kepada khalayaknya.

Sebagai da'i merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jamaah persatuan islam. Dalam konteks ini, da'i adalah merupakan tampilan *back stage*, sementara statusnya sebagai politikus, yang identik dengan identitas subjektif, menurut Berger dan Luckmann (1990) dalam Mulyana (2003) merupakan identitas yang dihadirkan atau dikonstruksi oleh jamaah persatuan islam sebagai tampilan *front stage*, hal tersebut didasari oleh keinginan para anggota legislatif (jamaah persatuan islam) untuk menampilkan sosok diri yang baik, politikus yang selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

Berlandaskan perspektif dramaturgis, maka dapat dikatakan bahwa jamaah persatuan islam. Harus mampu memainkan perannya dalam permainan politik tanpa menanggalkan dirinya sebagai seorang pendakwah. Hal inilah yang dilakukan jamaah persis, dalam menampilkan diri sebagai seorang politikus yang profesional, dengan menampilkan sikap dan perilaku yang baik yang mencerminkan suri tauladan bagi masyarakat, dimana dalam dirinya melekat sebagai seorang ahli agama. Karena masyarakat sering menyoroti bahwa politikus sering membohongi, politik itu kotor, penuh tipu daya, serta label-label negatif yang berkembang sebagai *common sense* di masyarakat. Oleh karena itu munculnya status subjektif ditandai oleh adanya upaya jamaah persatuan islam untuk mengkonstruksi realitas-realitas tertentu yang antar lain dengan cara mengelola kesan tertentu, agar nampak dimata orang lain sebagai politikus yang bersih, jujur dan amanah. Pengelolaan kesan jamaah persatuan islam dapat dilihat ketika mereka berinteraksi dengan orang lain pada konteks tertentu atau situasi sosial tertentu. Ini merupakan gambaran mengenai panggung depan (*front stage*) jamaah persatuan islam dalam menentukan setting pengelolaan kesan mereka.

Kesadaran sebagai da'i membawa jamaah persatuan islam untuk melakukan perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang politikus. Pengelolaan kesan yang dilakukan jamaah persatuan islam selaku da'i juga politikus berawal dari persoalan mempresentasikan diri dan juga citra dirinya di depan orang lain yang telah memandang atau memposisikan dirinya sebagai da'i juga politikus. Strategi pengelolaan kesan yang dilakukan oleh jamaah persatuan islam untuk membangun citra diri yang baik di mata khalayaknya agar memuluskan perjuangan dakwah mereka. Terkait hal

tersebut, bagaimana pola komunikasi politik yang dilakukan oleh jamaah persatuan islam, tentunya tidak lepas dengan bagaimana mereka melakukan strategi komunikasi politik yang dijalankannya.

Komunikasi politik persatuan islam merupakan konstruksi politik yang menuntut langkah-langkah tepat dan implementasinya sebagai konsekuensi dari pandangan politiknya, sekaligus menjadi pedoman politik jamaah persatuan islam. Oleh karena itu komunikasi politik jamaah persatuan islam harus mencerminkan langkah dakwah islam, hal inilah yang kemudian ditransformasikan ke dalam ragam komunikasi politik jamaah persatuan islam. Begitu pula mengenai strategi komunikasi politik persatuan islam tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial politik pada saat langkah politik dirumuskan. Ini tercermin dari strategi komunikasi politik yang dibangun, dan terefleksikan dalam strategi yang saling terkait, yaitu bagaimana dapat memiliki otoritas politik (kekuasaan legislatif), yang dapat mendukung kemudahannya untuk berdakwah.

## **PENUTUP**

Hingar bingarnya kancah perpolitikan di Indonesia, serta terbukanya kran kebebasan, telah mendorong lahirnya berbagai partai politik di tanah air, tidak terkecuali partai-partai politik berlatar keagamaan, termasuk salah satunya adalah organisasi keagamaan Persatuan Islam (PERSIS), yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai ormas keagamaan, yang berdiri dalam dua sisi Agama dan Politik, kehadirannya dalam kancah politik tentu telah memunculkan fenomena menarik bagaimana Persis memainkan kinerja komunikasi politiknya. Konstruksi komunikasi politik yang dijalankan oleh jamaah persatuan islam telah mengkonstruksi setiap komunikasi yang dilakukannya dengan berdasarkan pada pemaknaan subjektif tentang perjalanan kehidupannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmara Dani. AlGhifari. Abu. (2002). *Sejarah Perjuangan Pemuda Persis*. Bandung. Mujahid
- Badri. (2008). *Gerakan Modern Dalam Islam*. Bandung. Alsina
- Creswell, JW. (2002). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, California, Sage Publication
- Kantaprawira. Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia. Suatu Model Pengantar*. Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Kamiluddin. Uyun. (2006). *Menyorot Ijtihad Persis*. Bandung. Humaniora.
- Mufti. (1999). *Arah Perjuangan Menuju Pencerahan Persatuan Islam*. Bandung. Bulan Bintang
- Mulyana. Deddy. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- (2013). *Komunikasi Politik. Politik Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. Zulkarimen. (1990). *Komunikasi Politik. Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nugraha, dan Romli. (2012). *Strategi Komunikasi Pembangunan Pada Program Desa Peradaban Sebagai Bentuk Peningkatan Citra Pemerintah Daerah*. Kajian Komunikasi 1 Desember. Hal (9-19)
- Sumarno.AP. (2002). *Komunikasi Politik*. Jakarta. Pusat Penerbitan UT.

- Supardan. Dadang. (2009). *Pengantar Ilmu Sosiologi; Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sutrisno. (2011). “*Komunikasi Politik Aktivis Partai Politik Islam Indonesia. (Studi Fenomenologi aktivis PKS, PBB,dan PPP dalam Memaknai Teroris dan Jihad dalam Islam)*”. Disertasi. Unpad.
- Turmudi. Hamzah. (2014). “*Komunikasi Politik Persatuan Islam (Studi Fenomenologi Tentang Ijtihad Siyasi Jamaah Persatuan Islam)*”. Disertasi. Unpad